

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I. Hukum Tanah Nasional, Edisi 2007. Jakarta : Djambatan, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*. Edisi 2008. Jakarta : Djambatan, 2008.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Cet. I. Bandung : Nuansa Aulia, 2007.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak – Hak yang Memberi Jaminan*. Jilid II. Jakarta : Ind-Hill Co, 2002.
- H Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.
- Herowati, Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Cetakan I. Yogyakarta : Mutrofin, 2007.
- R Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.19. Jakarta : Intermasa, 2002.

### B. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3643.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3696.
- \_\_\_\_\_. *Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2043.
- \_\_\_\_\_. *Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas*

*Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3632.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3790.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4796.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1998 tentang *Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal*.

SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.